



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 04 Juni 2026

Halaman: 3

Tunggakan Berujung Ijazah Ditahan

■ Kepala SMA 2 Yogya Bantah Intimidasi Siswa

YOGYA, TRIBUN - Praktik penahanan ijazah dan pungutan berkedok sumbangan di sekolah negeri kembali mencuat dan mencoreng wajah pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Yogyakarta diduga mempersulit penyerahan ijazah seorang siswa akibat adanya tunggakan uang sumbangan yang bermula saat siswa tersebut masuk melalui jalur pindahan dari luar kota.

Kasus ini mencuat ke publik setelah orang tua siswa, L (54), didampingi oleh Siti Zaura Humaira selaku Sekretaris dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sarang Lidi, membuat laporan kejadian ini hingga ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta.

Akar permasalahan ini bermula ketika L memin-dahkan anaknya dari Medi-un, Jawa Timur, ke SMAN 2 Yogyakarta pada saat kelas 2 SMA. Kepindahan ini di-latarbelakangi oleh kondisi bisnis keluarga yang sedang mengalami kebangkrutan hingga seluruh harta terkurus habis, yang memaksa mereka mengontrak rumah di Yogyakarta dengan sistem pembayaran bulanan.

Siswa tersebut berhasil masuk ke SMAN 2 Yogyakarta secara murni melalui jalur tes, menyisihkan belasan pendafar lainnya. Namun, keluarga justru dikejutkan dengan adanya beban biaya bernilai jutaan rupiah yang diklaim sekolah sebagai sumbangan pembangunan.

Tunggakan sumbangan itulah yang kemudian terus ditagih oleh pihak sekolah setiap kali momen pembagian rapor tiba, hingga berting-pada terbitnya ijazah saat kelulusan.

Terkait besaran pungutan yang ditibakan dan bagaima-na realistis orang tua siswa pindahan lainnya, L mengelak secara rinci bahwa nominal tersebut sangat memberatkan keluarganya yang sedang berada di titik nadir perkonomian.

"Awalnya Rp10 juta, turun Rp7,5 juta, jadi 5,5 juta. Ya karena minta keringanan, ya, ini 5,5 juta sudah terbayar sekitar kira-kira Rp2 juta. Sisa yang tinggal Rp3,5 juta. Rata-rata ini belum bisa melunasi. Sampai kelas 3 karena kredit. Karena memang eng-gak ada sama sekali. Sebetulnya mereka orang tua murid pindahan lain itu waktu kena biaya sekian tuh mereka juga kaget, nggak gitu. Tapi mereka orang-orang yang sama. Jadi ya sudahlah mereka bayar demi anak-anaknya biar bisa masuk. Sebetulnya mereka nggak juga, kaget gitu loh, kok segini banyaknya ya sampai Rp10 juta," ungkap L ditemui di Inspektorat DIY, Rabu (3/6).

Puncak dari masalah ini terjadi pada hari Jumat pe-

DIDUGA DIPERSULIT

- Praktik penahanan ijazah dan pungutan berkedok sumbangan di sekolah negeri kembali mencuat.
- SMA Negeri 2 Yogyakarta diduga mempersulit penyerahan ijazah seorang siswa.
- Hal ini diduga akibat adanya tunggakan yang sumbangan yang bermula saat siswa tersebut masuk melalui jalur pindahan dari luar kota.
- Kepala SMA Negeri 2 Yogyakarta menepis serangkaian tuduhan yang dalmatkan kepada institusinya terkait dugaan penahanan ijazah siswa, penarikan uang sum-bangan hingga belasan juta rupiah, serta intimidasi terhadap siswa.

kan lalu, yang seharusnya menjadi hari kebahagiaan bagi para siswa karena jadwal pembagian ijazah. Namun, siswa anak dari L yang sudah berada di kelas dan siap menerima ijazah justru tidak langsung mendapatkannya. Oleh wali kelasnya, ia justru diarahkan untuk menemui pihak bendahara terlebih dahulu. Setelah mengetahui bahwa penahanan tersebut terkait tunggakan yang belum dilunasi, sang anak akhirnya terpaksa pulang ke rumah dalam keadaan sangat kecewa.

Menurut Siti Zaura Humaira, tidak ada aturan resmi yang memperbolehkan SMA negeri untuk mengenakan pembayaran bersifat wajib kepada murid. Siti Zaura menyoreti celah ketidaktransparan pada mekanisme manajemen pengisian kursor oleh siswa pindahan yang dinilai menjadi ruang bagi sekolah untuk bermain dan melakukan pungutan.

Menindaklanjuti kekecewaan siswa tersebut, pihak Sarang Lidi bersama orang tua langsung mendatangi sekolah dan ditemui oleh Kepala Sekolah, Kepala Bidang Kurikulum, serta wali kelas. Rabu (3/6).

Meski ijazah pada akhirnya telah diberikan, tindakan intervensi tidak berhenti sampai di situ. Siti Zaura Humaira mengungkapkan kekecewaan dan keprihatinannya atas adanya tindakan intimidasi secara verbal yang dilakukan langsung oleh Kepala Sekolah kepada siswa bersangkutan melalui sambungan telepon pada hari Senin, yang justru menimpaikan mental sang anak dalam tekanan.

Menbantah
Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Yogyakarta, Suprihatin, menepis serangkaian tuduhan yang dalmatkan kepada institusinya terkait dugaan penahanan ijazah siswa, penarikan uang sumbangan hingga belasan juta rupiah, serta intimidasi terhadap siswa. Ia menjelaskan bahwa arahan ke bendahara bukanlah upaya pengalihan akibat penahanan ijazah, melainkan semata-mata prosedur konfirmasi ulang (cross-check administratif keuangan).

"Selama ini kami tidak pernah menahan ijazah ya. Kami berikan kemarin hari Jumat. Tapi ada beberapa

anak yang belum mengambil ijazah. Sebenarnya itu bukan terkait dengan tunggakan sumbangan sukarela itu enggak. Ya kami hanya konfirmasi saja, apa benar ini belum menyempatkan sumbangan sukarelanya. Karena kemungkinan orang tua sudah membayarkan, tetapi kami salah mencatat atau bagaimana. Yang kedua, kemungkinan orang tua sudah menyempatkan lewat anak tetapi belum dibayarkan dan lain sebagainya. Jadi kami tidak meneghi, tidak. Apalagi menahan ijazah karena terkait dengan masalah keuangan," urai Suprihatin, Rabu (3/6).

Sekarela
Suprihatin membantah keras adanya sistem potongan harga atau insentif-mawar selayaknya transaksi komersial. Ia menegaskan, pendafar form kesanggupan murni dikembalikan kepada kemampuan masing-masing orang tua tanpa ada pemaksaan.

"Enggak enggak ada itu yang memulus kesanggupan (tanggungan) sendiri, cuma yang memulus kesanggupan saja. (Soal sumbangan dipatok Rp10 juta? Wah, itu dari mana infonya? Kami tidak pernah mematok. Itu secara sukarela. Tidak tidak ada kewajiban). Karena ada yang Rp0 (nol), tidak memberikan sumbangan sukarela. Ada yang Rp100 ribu gitu. Tidak benar itu turun dari Rp10 juta ke Rp 5,5 juta. Karena itu yang memulus adalah orang tua sendiri. Kami tidak pernah ada rembusan (asuransi), terkait dengan kesanggupan sumbangan sukarela itu," papar Suprihatin.

Suprihatin juga meluruskan ihwal retribusi resmi pembayaran sumbangan dari keluarga L. Menurut data sekolah, pembayaran sum-bangan justru tidak pernah datang langsung dari orang tua yang bersangkutan, melainkan dari instansi kerabat.

"Yang bersangkutan mem-lis berapa? Kalau dari orang tua (TS) (yang bersangkutan) itu belum pernah dibayar. Kalau orang tua langsung belum pernah. Kalau orang tua langsung (belum), itu tidak baik dari sudutannya. Belum sampai itu institusi (kekurangan). Saya tidak tahu pernah dilunasi. Itu sudarenya lho. Bukan orang tua yang membayar," tambah-

nya. (abn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005